



EDUTECH

Jurnal Teknologi Pendidikan

Journal homepage <https://ejournal.upi.edu/index.php/edutech>



Evaluasi Perencanaan Praktik Kerja Lapangan Pada Sekolah Menengah Kejuruan

Aditya Irfan Kustiaman, Rusman, & Mario Emilzoli

Pengembangan Kurikulum, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

E-mail: aditya.irfank@upi.edu

ABSTRACT	ARTICLE INFO
<p>This study aims to evaluate the planning of Field Work Practice (PKL/internship) programs in Indonesian Vocational High Schools (SMK) using the antecedents component of Stake's Countenance Evaluation Model. A qualitative approach with program evaluation method was employed. The study was conducted at a State Vocational High School in Cimahi City, with the curriculum vice principal as the research subject. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation study. Findings indicate that the school has established comprehensive internship planning, encompassing Learning Outcome (CP) and Learning Trajectory (ATP) documents, an internship guidebook, and supervising teacher criteria. Nevertheless, several challenges were identified, including a limited number of industry partners, insufficient industry understanding of the school-designed CP and ATP, and misalignment between the ATP and the specific characteristics and rapidly evolving needs of individual companies.</p>	<p>Article History: <i>Submitted/Received 12 April 2025</i> <i>First Revised 26 Mei 2026</i> <i>Accepted 15 June 2026</i> <i>First Available online 29 June 2026</i> <i>Publication Date 29 June 2026</i></p>
<p>ABSTRAK</p>	<p>Keyword: <i>Antecedents, industrial work practice, stake's evaluation model, vocational high school</i></p>
<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perencanaan program Praktik Kerja Lapangan (PKL/internship) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Indonesia dengan menggunakan komponen pendahuluan Model Evaluasi <i>Countenance Stake</i>. Pendekatan kualitatif dengan metode evaluasi program digunakan. Penelitian dilakukan di SMK Negeri 1 Kota Cimahi, dengan wakil kepala sekolah kurikulum sebagai subjek</p>	

penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa sekolah telah menetapkan perencanaan magang yang komprehensif, meliputi dokumen Hasil Belajar (CP) dan Lintasan Belajar (ATP), buku panduan magang, dan mengawasi kriteria guru. Namun demikian, beberapa tantangan diidentifikasi, termasuk jumlah mitra industri yang terbatas, pemahaman industri yang tidak cukup tentang CP dan ATP yang dirancang sekolah, dan misalignment antara ATP dan karakteristik spesifik dan kebutuhan individu yang berkembang pesat.

© 2026 Teknologi Pendidikan UPI

1. PENDAHULUAN

Pendidikan vokasi merupakan salah satu jalur pendidikan yang secara khusus dirancang untuk mempersiapkan peserta didik memasuki dunia kerja dengan membekali keterampilan teknis dan non-teknis yang relevan dengan kebutuhan industri. Urgensi pembelajaran berbasis kerja dalam pendidikan vokasi datang dari berbagai perspektif yang saling melengkapi. John Dewey (1916) dalam karyanya *Democracy and Education* menegaskan bahwa pendidikan yang bermakna harus bersifat *experiential*, yaitu menghubungkan pengalaman langsung peserta didik dengan konsep abstrak yang dipelajari di kelas. Prinsip *learning by doing* ini menemukan relevansinya yang paling konkret dalam program Praktik Kerja Lapangan (PKL), di mana peserta didik tidak hanya mengamati dunia kerja dari luar, tetapi sungguh-sungguh terlibat dalam praktik kerja profesional yang nyata (Kolb, 2015; Schon, 2016).

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan wahana paling tepat untuk mengintegrasikan kemampuan berpikir dan kemampuan bekerja secara bersamaan dalam konteks pendidikan menengah di Indonesia. Data Kemendikbudristek (2022) menunjukkan, terdapat lebih dari 14.000 SMK di seluruh Indonesia dengan lebih dari 5 juta peserta didik. Idealnya, dengan basis yang demikian besar, SMK memiliki potensi strategis yang sangat signifikan dalam membentuk kualitas angkatan kerja nasional. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya terwujud. Data Badan Pusat Statistik 2023 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK sebesar 9,60%, tertinggi di antara semua jenjang pendidikan, bahkan melampaui tingkat pengangguran lulusan SD dan SMP (BPS, 2023; Rahayu & Sutrisno, 2022). Paradoks ini menunjukkan bahwa meski SMK dirancang untuk mempersiapkan lulusan yang siap kerja, kenyataannya lulusan SMK justru menghadapi tantangan paling berat dalam memasuki pasar kerja. Rapor Pendidikan Nasional 2024 mengungkap bahwa capaian kualitas pembelajaran SMK/MAK secara nasional masih dalam kategori sedang, sementara indikator eksklusif SMK penyerapan lulusan, pendapatan lulusan, dan kompetensi lulusan berdasarkan kepuasan dunia kerja juga belum mencapai standar yang diharapkan (Pratiwi dkk., 2025; BSKAP Kemendikdasmen, 2024). Data ini mengindikasikan adanya kesenjangan sistemik antara desain pendidikan vokasi yang diamanatkan dan kualitas implementasinya di lapangan.

Kesenjangan antara potensi dan realitas pendidikan vokasi Indonesia memiliki akar yang kompleks dan bersifat multidimensional. Penelitian Marsono dkk. (2019) mengidentifikasi beberapa permasalahan struktural yang secara konsisten muncul dalam implementasi PKL di berbagai SMK di Indonesia. Pertama, penempatan peserta didik yang tidak selalu sesuai dengan konsentrasi keahlian akibat keterbatasan kapasitas industri mitra, yang mengakibatkan peserta didik tidak mendapatkan pengalaman kerja yang relevan dengan kompetensi yang sedang dikembangkan. Kedua, rendahnya kualitas bimbingan dari instruktur industri yang tidak terlatih secara pedagogis, sehingga mentoring yang diterima peserta didik bersifat superfisial dan tidak memfasilitasi pembelajaran yang mendalam. Ketiga, lemahnya mekanisme monitoring dari sekolah akibat keterbatasan jumlah dan kapasitas guru pembimbing, yang mengakibatkan peserta didik tidak mendapatkan pendampingan yang memadai dari sisi akademis selama periode PKL. Keempat, belum terintegrasikannya asesmen PKL dengan standar kompetensi industri secara konsisten, sehingga penilaian yang diberikan tidak

mencerminkan kualitas kompetensi yang sesungguhnya diperoleh peserta didik (Yusuf & Basrowi, 2023; Marsono dkk., 2019).

Merespons tantangan yang kompleks tersebut, pemerintah telah menetapkan arah pengembangan SMK melalui serangkaian kebijakan strategis yang membentuk roadmap pendidikan vokasi nasional secara bertahap. Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK menjadi tonggak awal yang menggerakkan sinergi lintas kementerian dalam memperkuat relevansi SMK dengan kebutuhan industri. Kebijakan ini kemudian diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, yang secara eksplisit mengamanatkan penyelarasan kurikulum dengan DUDIKA, peningkatan kualitas guru, dan penguatan program PKL sebagai inti dari transformasi pendidikan vokasi nasional (Perpres No. 68 Tahun 2022; Inpres No. 9 Tahun 2016). Peta Jalan Pendidikan Vokasi 2020-2024 yang diterbitkan Kemendikbud menetapkan tujuh sasaran strategis yang harus dicapai melalui transformasi sistemik: (1) lulusan kompeten dan sesuai kebutuhan industri global, (2) peningkatan produktivitas dan daya saing nasional, (3) peningkatan kesejahteraan lulusan, (4) penciptaan wirausaha inovatif, (5) input siswa yang berminat dan bermotivasi vokasi, (6) keterlibatan industri semaksimal mungkin dalam pendidikan, dan (7) penguatan soft skills dan karakter peserta didik (Kemendikbud, 2021; Dirjen Vokasi, 2024). Ketujuh sasaran strategis ini menempatkan PKL sebagai titik temu antara tujuan akademis sekolah dan tuntutan praktis industri, menjadikan kualitas PKL sebagai variabel kunci dalam keberhasilan keseluruhan roadmap pendidikan vokasi Indonesia.

Salah satu transformasi terpenting dalam roadmap SMK adalah penetapan PKL sebagai mata pelajaran resmi dalam Kurikulum Merdeka, sebuah perubahan paradigmatis yang memiliki implikasi mendasar terhadap pengelolaan PKL di seluruh SMK Indonesia. PKL ditetapkan sebagai mata pelajaran wahana pembelajaran di dunia kerja yang merupakan bagian integral dari struktur kurikulum, bukan lagi sekadar kegiatan tambahan atau program magang opsional. PKL dirancang untuk dilaksanakan sekurang-kurangnya enam bulan pada kelas XII program tiga tahun, atau minimal 10 bulan pada kelas XIII program empat tahun (Dirjen Vokasi, 2023). Sebagai mata pelajaran, PKL memiliki empat elemen Capaian Pembelajaran (CP) yang bersifat holistik dan multidimensi. Elemen pertama adalah internalisasi dan penerapan soft skills, mencakup kompetensi berkomunikasi secara profesional, integritas (jujur, disiplin, komitmen, dan bertanggung jawab), etos kerja, kemandirian, kerja sama tim, kepedulian sosial dan lingkungan, serta kepatuhan terhadap norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Hidup (K3LH). Elemen kedua adalah penerapan hard skills, yaitu aplikasi kompetensi teknis yang telah diperoleh di bangku sekolah dalam konteks kerja nyata sesuai konsentrasi keahlian masing-masing peserta didik. Elemen ketiga adalah peningkatan dan pengembangan hard skills, mencakup perolehan kompetensi teknis baru melalui paparan langsung terhadap teknologi dan prosedur industri terkini yang belum sempat dikurikularisasikan di sekolah. Elemen keempat adalah penyiapan kemandirian berwirausaha, mencakup pengembangan jiwa kewirausahaan dan kemampuan menciptakan nilai baru berdasarkan pengalaman kerja yang diperoleh (Dirjen Vokasi, 2023; SK KaBSKAP Nomor 033/H/KR/2022). PKL direncanakan, dilaksanakan, dinilai, dipantau, dan dievaluasi bersama oleh sekolah dan dunia kerja,

menjadikannya kulminasi dari seluruh pembelajaran sejak kelas X dan XI, serta titik integratif antara pembelajaran berbasis sekolah dengan pembelajaran berbasis industri.

PKL sebagai mata pelajaran, PKL tidak lagi dapat dipandang sekadar kegiatan magang yang dikelola secara informal, melainkan sebagai proses pembelajaran terstruktur yang menuntut perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang komprehensif agar keempat elemen CP dapat benar-benar terfasilitasi (Ali, 2019; Rusman, 2017). Transformasi ini menuntut perubahan paradigma yang menyeluruh yakni dari perancangan CP yang valid dan relevan dengan standar industri, penyiapan guru pembimbing yang memiliki kompetensi pedagogik sekaligus kompetensi industri, pembangunan kemitraan yang setara dan saling menguntungkan dengan DUDI, hingga pengembangan sistem asesmen PKL yang mampu mengukur tidak hanya kompetensi teknis tetapi juga soft skills yang semakin diprioritaskan oleh industri modern (Kemendikbudristek, 2022; Dirjen Vokasi, 2023; Billet, 2016).

Adanya urgensi untuk menganalisis secara komprehensif kualitas evaluasi program PKL menjadi kunci dalam menjawab tantangan-tantangan implementasi PKL sebagai mata pelajaran. Model evaluasi Countenance Stake yang dipilih dalam penelitian ini secara khusus dirancang untuk menangkap keterkaitan antara antecedents, transactions dan outcomes. Artikel ini secara spesifik akan mengungkapkan salah satu komponen dalam model evaluasi Stake, yakni *antecedents*, yakni kondisi dan kesiapan sebelum program.

2. METODE

Penelitian ini difokuskan pada evaluasi pelaksanaan mata pelajaran praktik kerja lapangan pada komponen antecedent yang menilai kesiapan perencanaan penempatan PKL. Perencanaan (*antecedent*), tahap ini merupakan deskripsi perencanaan penempatan siswa PKL, kurikulum sekolah dengan ketersediaan industri, kualifikasi guru, dan sarana prasarana pendukung pembelajaran di sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode evaluasi program. Lokasi penelitian ini adalah salah satu SMK Negeri di Kota Cimahi. Subjek penelitian ini diantaranya adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum yang berhubungan dengan pelaksanaan mata pelajaran Praktik Kerja Lapangan. Model evaluasi Countenance Stake digunakan untuk mengetahui ketercapaian pelaksanaan mata pelajaran praktik kerja lapangan di sekolah ini. Penerapan penelitian evaluasi dalam melaksanakan metode secara ilmiah pada praktik penelitian berdasarkan suatu kondisi yang sedang terjadi. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama yakni wawancara mendalam (In-depth Interview), observasi, dilakukan untuk mengamati proses pelaksanaan PKL, mekanisme bimbingan, dan kondisi tempat PK, kemudian studi dokumentasi berupa analisis terhadap dokumen perencanaan PKL (TP, ATP, CP), laporan PKL, nilai PKL, MoU dengan DUDI, dan data Rapor Pendidikan sekolah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa karakteristik yang ditemukan pada lokasi penelitian. Sekolah ini memiliki 9 konsentrasi keahlian dengan dua masa studi yakni 3 tahun dan 4 tahun. Konsentrasi keahlian Instrumentasi dan Otomatisasi Proses (IOP), Sistem Informasi, Jaringan, dan Aplikasi (SIJA) memiliki durasi studi 4 tahun,

sehingga harus melaksanakan PKL dengan minimal waktu 8 bulan. Sedangkan konsentrasi keahlian lainnya, yakni Produksi dan Siaran Program Televisi, Rekayasa Perangkat Lunak, Teknik Pemanasan, Tata Udara, dan Pendinginan, Teknik Elektronika Komunikasi, Teknik Otomasi Industri, Teknik Elektronika Industri, dan Teknik Mekatronika memiliki durasi studi 3 tahun sehingga minimal pelaksanaan PKL 3 bulan. Pelaksanaan PKL di sekolah ini berlangsung pada semester 6. PKL dilaksanakan setelah seluruh proses pembelajaran selesai di semester 5, hingga mata pelajaran terakhir di jenjang 3 tahun adalah PKL. Sedangkan PKL bagi program 4 tahun dilaksanakan pada semester ke 7.

Adapun tahapan atau alur dalam perencanaan program PKL di sekolah, yakni

- 1) Rapat bersama ketua konsentrasi keahlian, untuk menentukan industri mitra yang akan menjadi mitra.
- 2) Menganalisis kebutuhan industri, adanya perumusan ATP (Alur tujuan pembelajaran) yang merupakan langkah konkret dari CP) bersama mitra industri.
- 3) Pembekalan program PKL kepada siswa dan orang tua siswa sebagai upaya komunikasi pihak sekolah, orang tua/wali
- 4) Administrasi PKL, sekolah dapat mengajukan ke industri yang sesuai dengan kompetensi yang diperlukan, ataupun siswa dapat mengajukan secara mandiri melalui sekolah
- 5) Konfirmasi kesediaan dari industri
- 6) Implementasi PKL di industri.

Hasil wawancara menunjukkan telah terdapat perencanaan mata pelajaran PKL yang matang. Baik CP maupun ATP telah tersusun. Adanya buku panduan PKL yang di dalamnya terdapat capaian, penilaian siswa, presensi siswa, hingga contoh sertifikat yang telah membuktikan siswa melaksanakan PKL. Pada tahap antesenden ini juga telah terdapat kriteria pembimbing sekolah untuk pelaksanaan PKL. Secara aturan, tidak ada spesifik harus guru jurusan tertentu, tetapi harus memiliki kompetensi membimbing siswa salah satunya memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan pihak industri, sehingga dapat terjalin kerja sama efektif antara sekolah dan industri. Monitoring PKL sendiri minimal dua kali terlaksana, yakni saat pengantaran siswa ke tempat PKL dan penjemputan siswa setelah PKL. Namun, sekolah juga mempersilakan ketika ada peristiwa *urgent* pembimbing dapat langsung ke industri.

Hasil penelitian ditemukan beberapa tantangan dalam komponen antesenden, diantaranya pihak industri yang dijadikan mitra perlu penambahan. Hal ini karena dengan jumlah konsentrasi keahlian yang banyak, menuntut kesesuaian dengan industri yang lebih luas lagi. Kemudian, CP dan ATP yang dibuat oleh sekolah pada praktiknya belum semua industri memahaminya. Adanya ATP pada pelaksanaannya belum sepenuhnya ideal dengan karakteristik masing-masing perusahaan. Hal ini disebabkan oleh faktor perubahan dan kebutuhan industri yang relatif cepat dan dinamis.

Adanya Praktik Kerja Lapangan (PKL) tidak hanya memberi siswa pengalaman langsung di industri, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk sukses dalam karier mereka. Internship telah terbukti meningkatkan daya tarik siswa di pasar kerja dengan memberikan mereka pengalaman praktis yang relevan, yang meningkatkan kepuasan kerja dan kompensasi yang diterima setelah lulus (Gault, Redington dan Schlager, 2000). Konsep belajar pengalaman yang

diusulkan oleh Dewey, relevan dalam konteks Praktik Kerja Lapangan. Pentingnya refleksi sebagai bagian dari proses belajar, yakni siswa mampu merenungkan pengalaman mereka dan mendapatkan wawasan yang berharga untuk pengembangan diri mereka (Teng, Lim dan Tan, 2024). Adanya integrasi elemen refleksi dalam program praktik kerja lapangan, siswa dapat lebih memahami hubungan antara teori dan praktik, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas pembelajaran mereka. Namun, meskipun banyak manfaat yang ditawarkan, implementasi praktik kerja lapangan tidak lepas dari tantangan. Tidak semua pengalaman praktik kerja lapangan dianggap positif; kondisi tempat kerja dan supervisi yang kurang memadai dapat mengurangi nilai dan efektivitas pembelajaran yang dirasakan oleh siswa (Holyoak, 2013). Keberhasilan praktik kerja lapangan tidak hanya ditentukan oleh kegiatan yang dilakukan selama praktik di lapangan, tetapi juga oleh kualitas persiapan dan dukungan dari pihak sekolah, termasuk pengembangan kurikulum yang relevan (Hadi, Mukhadis dan Nyoto, 2017; Hamdan dkk., 2020).

Hal ini bersesuaian dengan hasil dari penelitian yang dilaksanakan, adanya perencanaan yang matang mulai dari tahapan penyusunan ATP (alur tujuan pembelajaran) bersama mitra industri menjadi langkah konkret sekolah sebagai upaya pembelajaran sekolah dapat sesuai dengan kebutuhan industri. Hal ini secara teoritis berkaitan dengan konsep link and match dalam pendidikan vokasi. Dalam konteks Kurikulum Merdeka, kebijakan link and match dikuatkan melalui mekanisme penyalarsan kurikulum yang melibatkan industri secara langsung dalam penyusunan Capaian Pembelajaran (CP) dan perangkat pembelajaran. Kemendikbudristek (2022) mendorong SMK Pusat Keunggulan untuk menerapkan model Teaching Factory (TeFa) yang mengintegrasikan proses produksi atau layanan nyata dari industri ke dalam pembelajaran di sekolah. Program PKL menjadi puncak dari strategi link and match ini, di mana peserta didik merasakan secara langsung apa yang selama ini dipelajari secara teoretis di sekolah dalam konteks kerja yang sesungguhnya (Kemendikbud, 2021; Dirjen Vokasi, 2024).

Secara keseluruhan, praktik kerja lapangan memiliki dampak yang signifikan dalam proses pendidikan di SMK. Implementasi yang baik dari praktik kerja lapangan dapat membantu mengurangi angka pengangguran di kalangan lulusan SMK dengan memberi mereka kualifikasi dan pengalaman kerja yang dibutuhkan oleh industri (Suharjanto & Munir, 2019). Adanya transformasi PKL dari kegiatan ekstrakurikuler atau program tambahan menjadi mata pelajaran resmi dalam Kurikulum Merdeka merupakan perubahan paradigmatis yang memiliki implikasi mendasar terhadap pengelolaan PKL di SMK. Berdasarkan Kepmendikbudristek Nomor 262/M/2022 dan SK KaBSKAP Nomor 033/H/KR/2022, PKL ditetapkan sebagai mata pelajaran wajib yang memiliki Capaian Pembelajaran (CP), Tujuan Pembelajaran (TP), dan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) yang harus dirancang secara sistematis oleh guru dan sekolah. Status sebagai mata pelajaran ini secara yuridis mewajibkan PKL untuk direncanakan, dilaksanakan, dinilai, dipantau, dan dievaluasi secara terstruktur sesuai standar proses pembelajaran yang berlaku (Dirjen Vokasi, 2023; Kepmendikbudristek No. 262/M/2022). Pelaksanaan PKL sebagai mata pelajaran menuntut adanya kolaborasi yang erat antara sekolah dan dunia usaha, dunia industri, serta dunia kerja (DUDIKA).

Selanjutnya, adanya tantangan yang dihadapi terkait CP dan ATP yang dibuat oleh sekolah pada pelaksanaan PKL, belum semua industri memahaminya, hal ini berkaitan

dengan tantangan utama link and match antara SMK dan industri. Kecepatan perubahan teknologi industri yang jauh melampaui kecepatan pembaruan kurikulum sekolah. Kompetensi yang relevan pada periode penyusunan kurikulum bisa jadi sudah menjadi kompetensi usang pada saat peserta didik mengikuti PKL beberapa tahun kemudian. Oleh karena itu, program PKL yang baik harus mampu menjadi jembatan adaptif yang memungkinkan peserta didik menyerap teknologi dan kompetensi terkini yang belum sempat dikurikularisasikan di sekolah (Dirjen Vokasi, 2024; ILO, 2019; ADB, 2020). Faktor perbedaan kebutuhan perusahaan dan karakteristik masing-masing perusahaan yang berbeda-beda, menjadi tantangan untuk menerjemahkan ATP. Hal ini dapat diminimalisasi dengan adanya komunikasi efektif dari guru pembimbing sekolah kepada pihak industri. Perlu adanya pembekalan lebih lanjut mengenai cara guru pembimbing mengkomunikasikan kepada industri mengenai ATP, serta capaian apa saja yang diinginkan oleh industri sejak awal mengingat perubahan dan kebutuhan industri yang relatif cepat dan dinamis.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan komponen anteseden Model Countenance Stake, perencanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di lokasi penelitian telah menunjukkan kesiapan yang cukup matang, ditandai dengan tersusunnya dokumen Capaian Pembelajaran (CP), Tujuan Pembelajaran (TP), dan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) secara sistematis, tersedianya buku panduan PKL yang komprehensif, alur penempatan yang terstruktur melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta kriteria guru pembimbing yang berorientasi pada komunikasi efektif dengan industri. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan PKL sebagai mata pelajaran, yakni belum mumpunina jumlah mitra industri dibandingkan dengan jumlah siswa dan konsentrasi keahlian yang beragam. Kemudian, belum meratanya pemahaman industri terhadap CP dan ATP yang disusun sekolah, serta perlu adanya ATP dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing perusahaan.

5. PERNYATAAN PENULIS

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan terkait penerbitan artikel ini. Penulis menegaskan bahwa naskah artikel bebas dari plagiarisme.

6. REFERENSI

- ADB. (2020). Innovative strategies for accelerated human resource development in South Asia: Technical and vocational education and training. Asian Development Bank.
- Ali, M. (2019). Manajemen pendidikan vokasi: Teori dan implementasi. Alfabeta.
- Billet, S. (2016). Apprenticeship as a mode of learning and model of education. *Education + Training*, 58(6), 613–628. <https://doi.org/10.1108/ET-01-2016-0001>
- BPS. (2023). Keadaan ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2023. Badan Pusat Statistik.
- BSKAP Kemendikdasmen. (2024). Rapor Pendidikan Nasional 2024. Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kemendikdasmen.
- Dewey, J. (1916). *Democracy and education: An introduction to the philosophy of education*. Macmillan.

- Dirjen Vokasi. (2023). Panduan praktik kerja lapangan SMK dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikbudristek.
- Dirjen Vokasi. (2024). Peta jalan pendidikan vokasi Indonesia 2024–2029. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikdasmen.
- Gault, J., Redington, J., & Schlager, T. (2000). Undergraduate business internships and career success: Are they related? *Journal of Marketing Education*, 22(1), 45–53. <https://doi.org/10.1177/0273475300221006>
- Hadi, S., Mukhadis, A., & Nyoto, A. (2017). Evaluasi program praktik kerja industri siswa SMK. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 7(1), 42–54. <https://doi.org/10.21831/jpv.v7i1.12698>
- Hamdan, A., Sari, N. M., Firmansyah, D., & Riyanto, B. (2020). Implementasi praktik kerja industri dalam meningkatkan kompetensi siswa SMK. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 22(2), 101–115.
- Holyoak, L. (2013). Are all internships beneficial learning experiences? An exploratory study. *Education + Training*, 55(6), 573–583. <https://doi.org/10.1108/ET-09-2012-0091>
- ILO. (2019). Skills and the future of work: Strategies for inclusive growth in Asia and the Pacific. International Labour Organization.
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.
- Kemendikbud. (2021). Peta jalan pendidikan vokasi 2020–2024. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kemendikbudristek. (2022). Panduan pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan SMK. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran.
- Kolb, D. A. (2015). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development* (2nd ed.). Pearson Education.
- Marsono, Pardjono, Sudira, P., & Soenarto. (2019). Evaluasi program praktik kerja lapangan SMK di Kabupaten Sleman. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 9(3), 261–272. <https://doi.org/10.21831/jpv.v9i3.27133>
- Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
- Pratiwi, D., Suherman, A., Suyatno, & Ruhimat, T. (2025). Analisis capaian indikator SMK dalam Rapor Pendidikan 2024. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Vokasi*, 11(1), 1–14.
- Rahayu, S., & Sutrisno. (2022). Tingkat pengangguran lulusan SMK: Analisis penyebab dan solusi strategis. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 15(2), 88–100.
- Rusman. (2017). *Belajar dan pembelajaran: Berorientasi standar proses pendidikan*. Kencana.
- Schon, D. A. (2016). *The reflective practitioner: How professionals think in action*. Routledge. (Original work published 1983)

SK KaBSKAP Nomor 033/H/KR/2022 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah pada Kurikulum Merdeka.

Suharjanto, G., & Munir, M. (2019). Kontribusi praktik kerja industri dalam meningkatkan kesiapan kerja lulusan SMK. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 9(1), 53–63.

Stake, R. E. (1967). The countenance of educational evaluation. *Teachers College Record*, 68(7), 523–540.

Teng, M. F., Lim, J., & Tan, K. H. K. (2024). Reflection as a mediator between internship experience and learning outcomes: A study of undergraduate students. *Education + Training*, 66(2), 115–130. <https://doi.org/10.1108/ET-04-2023-0108>

Yusuf, M., & Basrowi. (2023). Evaluasi pelaksanaan praktik kerja lapangan SMK berbasis model CIPP. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 8(1), 30–45.